



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 079/TMS-SK/XI/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006 yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, seluas ± 9.240 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 06 November 2017.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 November 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
 7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.

10. Sertifikat dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
- c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.

11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 November 2017
Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono

**RESUME HASIL PENILIKAN Ke-4 KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT MITRA HUTANI JAYA**

1) IDENTITAS LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : Ir. Enjang Gangga Permana
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Perusahaan : PT MITRA HUTANI JAYA
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta Notaris Yulia, SH No.9 tanggal 31 Mei 2000.
Pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. C-202 HT.03.01. tahun 2000 tanggal 28 Januari 2000.
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Heleni Ritliany, SH, No. 4 tanggal 1 Februari 2012
 -
- c. SK IUPHHK-HT : Nomor 101/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, Luas 9.240 Ha
- d. Kantor Pusat : Plaza BII Menara II Lt. 19, Jl. MH. Thamrin Kav. 51
Jakarta
Telp: 021-30407800

- e. Kantor Cabang : Jalan Teuku Umar No 51 A, Pekanbaru. Telp 0761 45942 – 23332. Fax 0761 24071
- f. Direktur Utama : Johnny Hartono

3) RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, 31 Oktober 2017	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru
Pertemuan Pembukaan	Kantor Unit PT MHJ, 1 November 2017	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a) Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b) Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d) Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Unit dan Areal Kerja PT MHJ, tanggal 1 s/d 04 Oktober 2017	a) Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b) Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c) Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Unit PT MHJ, 04 November 2017	a) Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b) Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c) Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, 06 Oktober 2017	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, Senin, tanggal 27 November 2017	a) PT MITRA HUTANI JAYA dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI. b) S-PHPL PT MITRA HUTANI JAYA dinyatakan “TERPELIHARA” sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT MHJ di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Perusahaan (Pendirian PT MHJ No. 9, Tanggal 31 Mei 2000 dengan Notaris Yuli, SH dan Akta Perubahan terakhir No.03, tanggal 25 Agustus 2017 dengan Notaris Heleni Ritliany SH), SK. IUPHHK-HT PT MHJ berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 101/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006, Dokumen RKUPHHK-HT PT MHJ periode tahun 2009 - 2019 berdasarkan Kepmenhut No. SK.134/VI/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Dokumen RKTUPHHK-HT PT MHJ tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT MHJ SK.01/MHJ/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, dokumen Laporan TBT PT MHJ No. 1539 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha.
	1.1.2.	Baik (3)	Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). Luas definitif areal kerja PT MHJ ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT MHJ atas areal kerja hutan produksi seluas 9.332,99 Ha (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) hektar di Provinsi Riau.
	1.1.3.	Baik (3)	PT MHJ telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas (BATB), akan tetapi masih terdapat konflik pada areal konsesi PT MHJ berupa klaim lahan oleh sebagian masyarakat (klaim Makmur Cs, Salim Cs, Guan Cs dan Doli Cs) luas total 481,5 Ha. Terhadap adanya konflik tersebut, PT MHJ melakukan upaya penyelesaian melalui ikatan Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat tersebut, sehingga pada tahun 2017 terjalin kerjasama pengelolaan lahan dengan pola kemitraan seluas 450,1 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.
	1.1.4.	Sedang (2)	Berdasarkan overlay peta areal kerja PT MHJ (lampiran KEPMENHUT No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013) dengan peta lampiran KEPMENLHK No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 menunjukkan bahwa seluruh areal PT MHJ adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Sedangkan berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, NLP 0916 (Lampiran KEPMENLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2017), bahwa areal PT MHJ memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut. Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT MHJ telah melakukan perubahan dan pengajuan pengesahan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HT periode tahun 2017 - 2026) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan dokumen perencanaan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tersebut saat ini masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
	1.1.5.	<i>NA (Not Applicable)</i>	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT MHJ yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHJ pada tanggal 1 September 2017. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2.	Baik (3)	PT MHJ telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Utama PT MHJ pada bulan Januari 2012 kepada semua pihak, baik karyawan perusahaan, mitra kerja dan masyarakat sekitar. Pada tanggal 1 September 2017 PT MHJ melakukan penyempurnaan terhadap rumusan visi dan misi yang secara substansi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan rumusan visi dan misi sebelumnya. Visi dan misi tersebut sampai dengan saat ini telah disosialisasikan.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi PHL PT MHJ pada umumnya telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT MHJ yang telah ditetapkan. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT MHJ adalah SPI/Internal Audit PT MHJ belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, PT MHJ belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP, kesehatan finansial perusahaan masih rendah, belum merealisasikan kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan secara keseluruhan, penempatan areal KPPN masih belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik penutupan areal, Implementasi kelola flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau, jarang, langka dan terancam punah dan endemik, belum terbentuknya koperasi karyawan sebagaimana ditentukan dalam dokumen PKB yang telah disepakati.
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. GANIS PHPL PT MHJ tercatat sebanyak 15 (lima belas) orang untuk seluruh bidang yang dipersyaratkan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015.
	1.3.2.	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM PT MHJ periode tahun 2016 dan 2017 telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPHPL sampai dengan tahun 2016 dan 2017 tercapai 100,00 %.
	1.3.3.	Baik (3)	PT MHJ memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut diantaranya dokumen PKB (Perjanjian Kerja Bersama) atas nama PT PT Mitra Hutani Jaya Periode Tahun 2016 - 2018 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Kab. Pelalawan No. KPTS.560/DTKT-PKB/2016/005, tanggal 23 Mei 2016, Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan PT MHJ, Surat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Keputusan Pengangkatan/Peningkatan Golongan Pegawai, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT MHJ.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT MHJ No. 006/MHJ/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017. Struktur organisasi tersebut dibuat lebih sederhana dalam rangka efektivitas atas dasar efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa SIM yang digunakan PT MHJ antara lain SAP (System Application and Product in data processing), SIPUHH Online, SIMPONI, FROS (Fire Report Online System) dan AS400. Sistem informasi manajemen tersebut dilengkapi dengan perangkat pendukung pengoperasiannya termasuk tenaga pelaksananya yang ditetapkan oleh Direksi PT MHJ.
	1.4.3.	Sedang (2)	PT MHJ memiliki Internal Auditor yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT MHJ No. 001/MHJ/V/2017, tanggal 15 Mei 2017. Personil internal auditor PT MHJ tersebut tercatat A.n Yogi Panbudi (NIK 904551). Internal audit PT MHJ belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal yang tertuang pada Internal Audit Report, No. 01/MHJ/AR/IA/06/16, Juni 2016 belum mencakup pengawasan kepada seluruh bidang. Disamping itu, sampai dengan dilakukan penilikan ini, Internal audit PT MHJ periode tahun 2017 belum dilakukan.
	1.4.4.	Baik (3)	Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, dilakukan manajemen PT MHJ melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Unit PT MHJ secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis hasil internal audit dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut. Sedangkan perbaikan berbasis hasil monitoring dan evaluasi di lapangan dilakukan secara langsung.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT 2017 PT MHJ telah disetujui oleh pejabat yang berwenang baik oleh pemerintah maupun secara self approval. Sosialisasi tata ruang dan RKT PT MHJ tahun 2017 telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2017 (Desa Gambut Mutiara) dan 26 Maret 2017 (Desa Segamai) yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT MHJ telah melibatkan para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan yang berbatasan langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas yang di tandatangani pada tanggal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			17 November 2010 oleh para pihak tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, proses penataan batas areal kerja PT MHJ telah selesai dilaksanakan pada tahun 2010 (temu gelang) dan telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013. PT MHJ juga telah melakukan sosialisasi tata batas areal kerja PT MHJ kepada masyarakat Desa Gambut Mutiara pada tanggal 25 Maret 2017 dan Desa Segamai pada tanggal 26 Maret 2017.
	1.5.3.	Baik (3)	Penyusunan program CSR/CD PT MHJ dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI), jangka pendek (RKTUPHHK-HTI) maupun Rencana Operasional (RO). Dokumen tersebut telah disetujui oleh para pihak yang berkepentingan baik Manajemen PT MHJ, pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT MHJ. Program CD-CSR PT MHJ periode tahun 2017 juga telah disetujui oleh masyarakat sekitar areal kerja berdasarkan Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan program CD-CSR PT MHJ yang ditandatangani oleh Pelaksana (PT MHJ), Kepala Unit PT MHJ, Desa Segamai dan Kepala Desa Gambut Mutiara yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2017.
	1.5.4	Baik (3)	Alokasi kawasan lindung PT MHJ dituangkan dalam dokumen baik Deliniasi Mikro, dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Kawasan Lindung PT MHJ dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Pengukuhan Kawasan Lindung Nomor 001/KL/06/2015. Kawasan Lindung areal kerja PT MHJ juga telah disetujui oleh masyarakat sekitar areal kerja berdasarkan Berita Acara Persetujuan dan Kesepakatan Kawasan Lindung PT MHJ yang ditandatangani oleh Pelaksana (PT MHJ), Kepala Unit PT MHJ, Desa Segamai dan Kepala Desa Gambut Mutiara yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2017

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun (Periode 2009 – 2018), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut memuat rencana tata ruang areal kerja yang menggambarkan alokasi areal yang diperuntukan sebagai : (1) kawasan lindung, (2) areal tidak efektif untuk produksi, dan (3) areal efektif untuk produksi. Serta rencana penataan areal kerja (kompartemenisasi) yang membagi areal efektif produksi kedalam blok dan petak. Penyusunan RKUPHHK-HTI tersebut telah mengacu kepada hasil IHMB dan hasil deliniasi makro. Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 sebagai penjabaran

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			dari PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, PT MHJ telah menindaklanjutinya dengan penelaahan areal kerjanya dan mengajukan Usulan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026.
	2.1.2.	Baik (3)	Rencana Penebangan (khususnya RKT tebangan tahun 2016 dan 2017), dalam hal rencana pembagian blok (lokasi dan luasan) telah mengacu pada dokumen dan peta RKUPHHK-HTI periode 2009 - 2018. Walaupun pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat areal yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya kemudian diluncurkan untuk dikerjakan di tahun berikutnya.
	2.1.3.	Baik (3)	Lokasi uji petik / verifikasi lapangan pada RKT 2017, tanda batas blok maupun petak masih terlihat jelas di lapangan, yakni berupa pal batas permanen (beton dan paralon) dan kanal/parit permanen, yang masih terpelihara dengan baik.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT MHJ memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2011, dan data potensi berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory</i> /PHI) untuk 3 tahun terakhir, dengan rata-rata potensi tegakan antara 150,91 m ³ /Ha s/d 196,98 m ³ /Ha.
	2.2.2.	Baik (3)	Areal PT MHJ terdiri dari 1 (satu) tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan rawa gambut. Terdapat data hasil pengukuran dan analisis data PSP berdasarkan hasil pengukuran 5 kali berturut-turut (tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016)
	2.2.3.	Sedang (2)	PT MHJ telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran selama 5 tahun berturut-turut dan sudah dianalisis, namun dalam perhitungan JTT belum memanfaatkan data riap hasil pengukuran pada PSP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009, dan revisi terakhir diterbitkan dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2017
	2.3.2.	Baik (3)	Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi dan wawancara, serta demonstrasi di lapangan terhadap praktek (implementasi) SOP dan atau WI sebagaimana telah ditetapkan, PT MHJ telah mengimplementasikan SOP maupun WI di lapangan.
	2.3.3.	Baik (3)	Berdasarkan hasil PHI selama 5 tahun terakhir (2013 s/d 2017) rata-rata potensi tegakan per hektar antara 150,91 m ³ /Ha s/d 196,98 m ³ /Ha dengan rata-rata untuk selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 179,01 m ³ /Ha. Nilai potensi rata-rata per hektar berdasarkan hasil PHI tersebut masih diatas realisasinya, yakni potensi rata-rata per hektar berdasarkan realisasi tebangan untuk tahun 2016 dan 2017, rata-rata potensi tegakan real adalah antara 136,17 m ³ /Ha s/d 137,62 m ³ /Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Berdasarkan hasil inventarisasi PAT pada periode November 2013 –2017, stocking (%) tanaman dengan kategori tingkat permudaan (berumur < 12 bulan), rata-rata adalah sebesar 91,9%. Dan Khususnya untuk hasil PAT tahun 2017 adalah sebesar 94,3%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT MHJ memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang termuat dalam SOP <i>Harvesting HTI-Wet Land</i> , SOP Pelaksanaan <i>Havex (Harvesting exellent)</i> , dan SOP Verifikasi <i>Havex</i> .
	2.4.2.	Baik (3)	PT MHJ telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan pada : - Perencanaan Penebangan :

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<p>Dibuat <i>Micro Planning</i> yang memuat rencana pembuatan jalur <i>excavator/felling strip</i>, penentuan arah rebah, rencana jalur ekstraksi, rencana TPn, dan rencana jalur pengangkutan kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penebangan : Mengatur penebangan secara sistematis dengan mengikuti urutan sesuai dengan rencana <i>felling coupe</i> yang telah direncanakan ; Tinggi tunggul diatur serendah mungkin ; Penarikan kayu yang mengikuti jalur ekstraksi yang telah ditentukan. ; Penumpukan kayu pada area (TPn) yang telah ditetapkan. - Pasca pelaksanaan penebangan : Implementasi <i>Havex (harvesting excellent)</i> sebagai kontrol atas pelaksanaan penebangan, yang menghitung besarnya <i>wood loss</i>, <i>wood residu</i>, tinggi tunggak, <i>spreading/matting row</i>, <i>skid track</i>. - Perlindungan Hutan : Sistem pemantauan kebakaran dini diterapkan salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi Sistem <i>FROS (Fire Report Online System)</i>, dan penggunaan <i>Drone</i> sebagai pesawat tanpa awak untuk mendeteksi asap yang muncul di areal kerja.
	2.4.3.	Baik (3)	Dari hasil perbandingan antara realisasi produksi dengan rencananya (berdasarkan hasil PHI), selama periode RKT 2015 dan selama periode RKT 2016, diperoleh nilai Faktor eksploitasi sebesar 0,99
2.5. BAIK (3)	2.5.1.	Baik (3)	Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 PT MHJ telah menyusun dokumen RKT yang mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2009 - 2018, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sejak tahun 2014 PT MHJ telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan RKT sendiri (<i>self approval</i>).
	2.5.2.	Baik (3)	Terdapat kesesuaian antara peta RKT 2016 dan 2017 dengan Peta Rencana Kerja pada dokumen RKUPHHK-HT Periode 2009 – 2018, yang menggambarkan penataan areal yang boleh dimanfaatkan (ditanami/ditebang) dan areal kawasan lindung (areal KPSL dan KPPN).
	2.5.3.	Baik (3)	Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja yang dibuat berupa patok batas dari beton, batas blok/petak berupa kanal dan parit dan penanda berupa plang yang terbuat dari seng.
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi tebangan tahun 2016, berdasarkan volume produksinya tercapai 78,8% dari total rencana tahunan ; dengan realisasi luasan tercapai 100%. Sedangkan realisasi tebangan tahun 2017 (s/d Oktober 2017), berdasarkan volume produksinya telah tercapai 61,1% dari total rencana tahunan ; dengan realisasi luasan telah tercapai 88,6%. Lokasi dan realisasi luas tebangan, baik tahun RKT 2016 maupun RKT 2017 telah sesuai dengan dokumen RKT. Sedangkan rencana dan realisasi tebangan (produksi) selama periode 1 tahun terakhir (periode penilikan) yakni November 2016 s/d Oktober 2017, realisasi luas tebangan tercapai 86% dari rencana ; dengan jumlah produksi tercapai 69% dari rencana.
2.6. BAIK (3)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen Opini laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			yang material". Nilai rentabilitas positif, namun dari segi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (likuiditas) untuk tahun 2016 masih dibawah 100% ; demikian pula dengan solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang) masih dibawah 100%.
2.6.2.		Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman untuk tahun 2016 rata-rata sebesar 92,3% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan.
2.6.3.		Baik (3)	Realisasi alokasi pembiayaan tertinggi adalah untuk kegiatan produksi yakni sebesar 98% ; dan terendah adalah untuk biaya administrasi dan umum yakni sebesar 86%. Dari perbandingan realisasi kedua alokasi pendanaan tersebut, terdapat perbedaan sebesar 12%.
2.6.4.		Baik (3)	Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan tahun 2016, realisasi pendanaan untuk tahun 2016 rata-rata sebesar 92,3%. Berdasarkan realisasi biaya tahun 2016 tersebut, mengindikasikan bahwa terpenuhinya pendanaan yang lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain, realisasi fisik kegiatan pelaksanaan pembangunan HTI sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, dan menunjukkan persentase pencapaian realisasi fisiknya tercapai antara 69% hingga 100%.
2.6.5.		Sedang (2)	Jumlah modal yang ditanamkan kembali ke hutan oleh PT MHJ dalam bentuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 16.612.274.608 atau 92,3% dari rencananya. Berdasarkan realisasi fisik kegiatan penanaman tahun 2016, persentase realisasi penanaman tanaman pokok adalah sebesar 90%, sedangkan untuk tanaman tanaman kehidupan/unggulan realisasi tertanam seluas 84,9 Ha.
2.6.6.		Baik (3)	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan/unggulan sampai dengan Oktober 2017 terealisasi 71,9% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi).

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Sedang (2)	Kawasan lindung PT MHJ terdiri dari 2 jenis yaitu KPPN dan DPSL, namun penempatan areal KPPN masih belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik penutupan areal karena ditempatkan di areal yang penutupannya sebagian besar berupa belukar muda, sedangkan DPSL ditempatkan di areal yang penutupannya sebagian besar berupa hutan rawa sekunder (LOA).
	3.1.2	Baik (3)	Penataan batas kawasan lindung PT MHJ telah selesai seluruhnya yaitu mencapai 42,9 km. Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 kegiatan terkait penandaan kawasan lindung berupa pemeliharaan tanda batas kawasan lindung (<i>signplate</i> , cat biru penandaan jalur rintisan kawasan lindung dan kanal tersier sebagai penanda kawasan lindung dengan areal produktif untuk produksi).
	3.1.3	Sedang (2)	Kawasan lindung PT MHJ yang berhutan mencapai 65,17 % atau setara dengan 749 ha dari 1.150 total luas kawasan lindung. Sedangkan rehabilitasi kawasan secara vegetatif direncanakan seluas 10 ha dan sampai dengan tahun 2017 baru terealisasi 25 %.
	3.1.4	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT MHJ telah mendapat pengakuan para pihak yaitu pemerintah pusat dan/atau daerah, manajemen PT MHJ dan masyarakat sekitar areal kerja. Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT MHJ kembali melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada warga Desa Gambut Mutiara dan Segamai yang ditandai dengan bukti-bukti dokumen berita acara sosialisasi
	3.1.5	Baik (3)	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT MHJ telah menyusun laporan hasil tindak kelola kawasan lindung sesuai yang mencakup seluruh kawasan lindung yaitu KPPN dan DPSL mencakup penataan batas, inventarisasi dan identifikasi jenis flora dan fauna, studi groundcheck kesesuaian jenis tanaman untuk rehabilitasi kawasan dll termasuk perlindungan kawasan . Laporan tersebut berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKTUPHHK-HT PT MHJ tahun 2017 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan PT MHJ Periode Juli- Desember Tahun 2016 dan Periode Januari-Juni Tahun 2017 3) Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwa, Desember 2016 4) Laporan Pengelolaan Flora Dan Fauna 2016 – 2017 5) Laporan Monitoring Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung PT Mitra Hutani Jaya, Januari 2017 6) Laporan Hasil Identifikasi Kawasan Lindung 2017 7) Laporan Perawatan Tata Batas Kawasan Lindung 2017
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Seluruh dokumen SOP perlindungan hutan PT MHJ tahun 2017 direvisi. Revisi hanya dilakukan pada Nomor Register Dokumen, kecuali pada SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No: SOP-MHJ-P-18 yang secara substantif direvisi untuk disesuaikan dengan peraturan terkini yaitu PERMEN LHK No. 32/ MenLHK/ Setjen/ Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
	3.2.2	Baik (3)	Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan mencakup seluruh gangguan termasuk sarana

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<p>pemadam kebakaran hutan. Jenis-jenis sarana pemadam kebakaran hutan telah sesuai jenisnya dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMEN LHK RI No. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 serta kondisinya baik. Sedangkan sarana perlindungan lainnya yang merupakan kelengkapan security diantaranya seperti : <i>Speed Boat 40 PK (1 Unit)</i>, <i>Staff Uniform (4 pcs)</i>, <i>Field Uniform (PDL:2 Sets/Year) (36 pcs)</i>, <i>Baton (PR 24) (9 pcs)</i>, <i>Handcuff (9 pcs)</i>, <i>Rain coat (9 pcs)</i>, <i>Jungle Knife (9 pcs)</i>, <i>pocket book & pen (18 pcs)</i>. Jumlah sarana security tersebut sesuai dengan tenaga security yang ada dan kondisinya masih baik.</p>
	3.2.3	Baik (3)	<p>Tersedia jumlah tenaga security sebanyak 16 orang, regu pemadam terdiri dari 3 regu dengan jumlah SDM sebanyak 33 orang ditambah 1 orang fire marshal dan GANIS BINHUT tersedia sebanyak 4 orang. Khusus untuk GANIS BINHUT, jumlah yang dimiliki PT MHJ telah sesuai dengan ketentuan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 yang menyebutkan untuk pemegang izin dengan luas areal kurang dari 25.000 cukup 1 orang</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Gangguan paling nyata yang terjadi di areal kerja PT MHJ adalah kebakaran hutan dan lahan. Tindak perlindungan untuk gangguan ini mencakup kegiatan preemtif, preventif dan represif dengan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), Desa Masyarakat Peduli Api (DMPA) dll, penyediaan sarana perlindungan hutan termasuk sarana deteksi dini kebakaran hutan serta pemadaman kebakaran hutan. Selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2017 tidak ditemukan titik api atau kebakaran di areal kerja pemegang izin.</p> <p>Gangguan lainnya berupa illegal logging yang terjadi di luar areal kerja, namun tindakan represif tetap ditempuh karena pelaku illegal logging menggunakan kanal sebagai akses kegiatan tersebut. Hama penyakit hutan baik di persemiaian maupun di plantation sejauh ini dapat ditangani di tingkat distrik dan gangguan perambahan hutan diselesaikan dengan penyediaan lahan/areal sebagai tanaman kehidupan.</p>
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air hasil revisi tahun 2017 dan dinyatakan berlaku efektif sejak Maret 2017. Revisi dokumen prosedur kerja tidak dilakukan pada substansi tahapan kelola dan pemantaun dampak, tetapi hanya pada register dokumen saja dengan tujuan penyeragaman register.</p> <p>Dokumen prosedur kerja antara lain : 1). Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan SOP-MHJ-E1-001; 2). Konservasi Tanah dan Air Pada Areal HTI SOP-MHJ-E1-002; 3). Evaluasi Aspek Lingkungan SOP-MHJ-E2-001; 5). Penanganan Limbah Padat SOP-MHJ-E2-007 dll dilengkapi dengan beberapa dokumen Work Instruksion seperti : 1). Pengukuran Debit Sungai Dan Kualitas Air Di Lapangan WI-MHJ-E1-001; 2). Pemantauan Biota Air WI-MHJ-E1-003; 3). Pengukuran Curah Hujan dan Pengamatan Cuaca WI-MHJ-E1-005 dll.</p> <p>Dokumen-dokumen prosedur kerja dan Work Instruksion PT MHJ mencakup seluruh dampak seperti yang dirinci pada dokumen RKL dan RPL.</p>
	3.3.2	Baik (3)	<p>Sarana kelola dampak PT MHJ antara lain terdiri dari : Jaringan kanal, Pintu <i>out flow</i>, Bloking, Gudang B3, Gudang</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<p>limbah B3, TPA sampah domestik. Sedangkan sarana pemantauan dampak antara lain : OMBROMeter, Peilschale, Pizometer dan Patok subsidiensi.</p> <p>Sarana pemantauan fisika dan kimia air tidak tersedia karena PT MHJ menyerahkan analisa kepada laboratorium tertentu yang telah diakreditasi. Sarana kelola dan pemantauan dampak tersebut sesuai dengan dampak sebagaimana dirinci pada RKL dan RPL dan masih berfungsi dengan baik.</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Tersedia struktur berupa Struktur Organisasi PT MHJ Tahun 2017 yang menunjukkan adanya jabatan tertentu pada kelola dan pemantauan dampak. Sesuai dengan struktur tersebut, tugas dan tanggung jawab kelola dan pemantauan dampak telah ditunjuk dengan tegas penanggung jawabnya termasuk tugas masing-masing jabatan. Selain itu, PT MHJ memiliki 4 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT dan jumlahnya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.3.4	Baik (3)	<p>Rencana kelola dampak PT MHJ berupa dokumen RKL yang disusun tahun 2003. Selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2017), tindak kelola dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan yang direncanakan antara lain seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Land clearing</i> tanpa pembakaran - Sebelum penanaman, tidak ada pengolahan tanah kecuali pembersihan lahan dari sisa-sisa tebagan - Penanaman dengan sistem tugal/taju - Antara penebangan dan penanaman jeda waktunya tidak lama - Pemupukan tanaman dilakukan pada saat tanaman baru berumur 4 bulan dengan pupuk NPK granular 15 : 15 - Penyegaran GANIS BINHUT a.n Bisri Mustofa, dan kegiatan lain termasuk mengelola bahan yang berpotensi menjadi polutan B3 dengan penyimpanan bahan2 dan sisa limbah B3 pada gudang tertentu.
	3.3.5	Baik (3)	<p>Tersedia rencana pemantauan dampak berupa dokumen RPL PT MHJ Tahun 2003. Implementasi pemantauan selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2017 sesuai dengan yang direncanakan mencakup : 1). Kesuburan tanah; 2). Muka air tanah dan 3). Kualitas air, yang didukung oleh sarana pemantauan seperti Peilschaal, Pizometer, Patok subsidiensi dan MBROMeter.</p>
	3.3.6	Baik (3)	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, pemantauan dampak dilakukan terhadap seluruh jenis dampak yang diperkirakan. Hasil pemantauan (secara langsung di lapangan/observasi dan laboratoris tidak menunjukkan gejala dampak besar dan penting. Hasil pemantauan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Water Level</i> : terkendali dan sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman pokok - Fisika Tanah : Gambut masih lembab dan tidak ditemukan gejala irreversible dry - Kimia Tanah : pH tergolong tinggi ($3,46 \pm 0,17$), Nisbah C/N tergolong tinggi, kandungan P tergolong tinggi, unsur K dalam bentuk pupuk NPK.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			- Subsistensi Gambut dan Tebentuknya Tanah Sulfat Asam : senyawa phyrit dapat dipertahankan pada kedalaman tanah dan tidak ada indikasi teroksidasi
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT MHJ berupa SOP Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi dengan Register dokumen : SOP-MHJ-E3-004. Dokumen ini telah mengakomodir seluruh jenis yang ditandai oleh teknik pemutahiran data berdasar CITES dan IUCN terbaru.</p> <p>Prosedur kerja tersebut didukung oleh beberapa dokumen Work Instruksion yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Identifikasi Satwa Liar. Register dokumen : WI-MHJ-E3-002 - Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi Pada Kawasan Lindung. Register dokumen : WI-MHJ-E3-003 - Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi. Register dokumen : WI-MHJ-E3-005
	3.4.2	Sedang (2)	PT MHJ telah memiliki daftar flora fauna sesuai identitas perlindungan dan kerawanan jenis yang disampaikan pada Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Pada tahun 2014. Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 data tersebut belum diperbaharui sesuai dengan CITES terbaru (valid from October 2017) dan IUCN terbaru. Dengan demikian, data tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai kondisi terkini.
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	Tersedia dokumen prosedur kerja pengelolaan flora PT MHJ meliputi SOP kelola habitat dan SOP perlindungan jenis. SOP kelola habitat antara lain : Pengelolaan Kawasan Lindung, Rehabilitasi Kawasan Lindung, Pembibitan Tanaman Hutan Jenis Lokal, Pengelolaan Dan Pemantauan HCV dan HCS dll. Sedangkan SOP perlindungan jenis yaitu : Pemantauan Dan Identifikasi Vegetasi Pada Kawasan Lindung, Identifikasi Dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi, Pengelolaan Pohon Ramin, Pengelolaan Pohon Sialang di Areal Konsesi HTI. Dokumen-dokumen prosedur tersebut mencakup pengelolaan seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi kelola flora selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2017) mencakup kegiatan : inventore dan identifikasi jenis serta pengamanan termasuk pemeliharaan kawasan lindung (pemeliharaan tanda batas). Hal penting yang belum terealisasi adalah target rehabilitasi belum sesuai dengan rencana yaitu baru mencapai 2,5 ha dari 10 ha yang direncanakan. Dengan demikian, implementasi kelola belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau, jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
	3.5.3	Baik (3)	Terdapat gangguan yang mengancam kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di aeral kerja PT MHJ yaitu kebakaran hutan dan lahan dan illegal logging. Namun ke-2 gangguan tersebut tidak sampai mengancam kondisi jenis yang ada karena jenis flora dilindungi dan rawan di areal PT MHJ umumnya terdapat di kawasan lindung (KPPN dan DPSL) dan kawasan ini relatif aman dari kebakaran hutan dan illegal logging.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Indikasi ini ditunjukkan oleh fluktuasi <i>Shanon Wiener</i> (H') baik di areal DPSL maupun di areal KPPN relatif rendah.
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	PT MHJ merevisi dokumen prosedur kerja kelola fauna dan dinyatakan berlaku efektif sejak Maret 2017. Dokumentasi tersebut selain mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja, juga mencakup prosedur kelola habitat antara lain Pengelolaan Kawasan Lindung, Rehabilitasi Kawasan Lindung, Penanganan Areal Bekas Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Areal HCV, Pengelolaan Dan Pemantauan HCV dan HCS, Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan perlindungan jenis meliputi : Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi, Penanganan dan Perlindungan Satwa Liar Diareal Konsesi, Pengelolaan Harimau Di Areal Konsesi Perusahaan, Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar, Pemantauan Dan Identifikasi Satwa Liar.
	3.6.2	Sedang (2)	Implementasi kelola fauna selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 meliputi : perlindungan jenis dan habitat (kawasan lindung), pemantauan satwa/fauna dan analisa indeks Shanon, kelola fauna dengan mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis satwa yang dijumpai. Pengelolaan kawasan lindung berupa rehabilitasi kawasan untuk memperbaiki kondisi tutupan kawasan belum terealisasi dengan baik. Prestasi rehabilitasi sampai dengan tahun 2017 tidak berbeda dengan hasil penilaian III tahun 2016 yaitu seluas 2,5 ha dari 10 ha yang direncanakan.
	3.6.3	Baik (3)	Terdapat beberapa gangguan yang mengancam kondisi spesies fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT MHJ, Gangguan tersebut berupa kebakaran hutan/lahan, klaim lahan oleh beberapa orang dan illegal logging. Namun gangguan tersebut tidak sampai mempengaruhi keberadaan dan populasi jenis satwa, karena dapat ditekan oleh pemegang izin dengan patroli pengamanan, pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan kawasan termasuk tindakan represif pelaku perusak habitat. Hal ini dibuktikan dengan analisa H' yang menunjukkan tidak banyak terjadi perubahan/fluktuasi jenis fauna yang ada di areal KPPN dan DPSL.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
4.1 BAIK (3)	4.1.1.	Baik (3)	PT MHJ telah menyusun dokumen yang menunjukkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar area kerja berupa dokumen perencanaan RKTUPHHK HT tahun 2016 dan tahun 2017. Disamping itu tersedia dokumen yang telah memuat dengan lengkap identifikasi masyarakat setempat yang menjadi sasaran kegiatan desa yang terkait dengan perencanaan pemanfaatan terhadap sumber daya hutan dan alam yang ada di sekitar area kerja PT MHJ berupa Laporan Penilaian NKT 2014, Laporan Studi Diagnostik Masyarakat Desa, Laporan Studi Social Impact Assessment dan laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal di PT MHJ tahun 2017.
	4.1.2.	Baik (3)	Batas areal kerja PT MHJ telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK. Saat ini tidak ada kegiatan pertanian oleh masyarakat di dalam areal kerja PT MHJ, karena sebagian besar telah disepakati menjadi areal tanaman kehidupan oleh pengklaim lahan. Mekanisme yang ada pada PT MHJ berupa prosedur penyelesaian konflik lahan. Isi prosedur tersebut sesuai dengan situasi areal kerja dan kegiatan operasional PT MHJ saat ini.
	4.1.3	Baik (3)	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat atas kegiatan masyarakat di dalam dan sekitar areal kerja PT MHJ telah terakomodir dalam prosedur baru yang disusun tahun 2017 yaitu SOP Pelaksanaan FPIC pada pembangunan areal HTI; SOP Program Social Forestry; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Kompensasi Sumber daya komunitas; SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat, Hak-hak dasar masyarakat dalam Kawasan konsesi.
	4.1.4	Sedang (2)	PT MHJ telah membuat batas yang jelas atas areal kerja PT MHJ berupa batas areal dan papan penanda batas. PT MHJ telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait batas areal kerja PT MHJ dilakukan secara berkala. Masyarakat mengetahui keberadaan tata ruang di dalam areal kerja PT MHJ. PT MHJ juga telah membuat batas antara areal kerja efektif dengan kawasan tanaman kehidupan berupa kanal dan papan penanda batas. Namun saat ini terdapat lahan yang belum disepakati peruntukannya seluas 34,1 Ha di dalam areal kerja PT HTI.
	4.1.5	Baik (3)	Dalam penataan tata batas areal kerja PT MHJ telah terdapat mendapatkan pengukuhan batas areal kerja dan diketahui prosesnya oleh masyarakat setempat. Informasi dan persetujuan atas batas areal diketahui dari materi Sosialisasi di Desa Gambut Mutiara dan Desa Segamai serta Desa Pulau Muda. Konflik terkait lahan garapan yang berada di dalam areal kerja PT MHJ telah disepakati untuk dijadikan kawasan tanaman kehidupan oleh pihak pengklaim dan PT MHJ.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT MHJ telah menyusun dokumen rencana kegiatan perusahaan tahun 2016 dan 2017 berupa RKTUPHHK HTI 2016 dan RKTUPHHK HTI 2017 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial. Detail kegiatan kelola sosial diuraikan dalam dokumen RO PMDH tahun 2016 dan 2017. Kegiatan yang menjadi fokus PT MHJ meliputi: Peningkatan SDM; Perekonomian; Kegiatan Sosial Budaya; Kegiatan Keagamaan; Infrastruktur. Kegiatan tanaman kehidupan telah dilakukan berupa penataan areal kerja.
	4.2.2.	Sedang (2)	PT MHJ telah memiliki mekanisme untuk pemenuhan tanggung

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<p>jawab sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI berupa prosedur, monitoring dan evaluasi. Dokumen penunjang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen prosedur yang sah dan legal untuk kegiatan CD-CSR yang terdiri dari SOP Program Social Forestry; SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat, Hak-hak dasar masyarakat dalam Kawasan konsesi; SOP Studi Dampak Sosial; SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil); SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat; SOP FPIC; SOP Pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan. 2) Terdapat laporan monitoring kegiatan CD-CSR, namun belum mencakup monitoring dan evaluasi kegiatan CD-CSR secara keseluruhan.
		Baik (3)	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan PT MHJ 2017 tentang hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT dan perencanaan kegiatan operasional perusahaan telah dilakukan di Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara dan Desa Pulau Muda.
		Sedang (2)	Kegiatan kelola sosial oleh PT.MHJ secara keseluruhan telah terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumen pendukung lainnya (tanda terima dan foto kegiatan). Kegiatan CD-CSR sebagian besar telah terealisasi sesuai rencana dalam bentuk bantuan CSR, Program DMPA dan Progam Sigahkar. Namun tanaman kehidupan masih belum terealisasi sesuai rencana.
		Baik (3)	Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.MHJ telah terdokumentasi dalam bentuk berita acara, laporan tenaga kerja, dokumen kerja sama kemitraan dan laporan periodik pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait. Masing-masing laporan telah memuat kegiatan pelaksanaan kelola sosial/CSR IUPHHK-HT PT MHJ. PT MHJ juga telah menyusun laporan pemantauan kegiatan kelola sosial. Dalam kegiatan operasionalnya, PT MHJ tidak menerapkan pemberian ganti rugi atas lahan bemasalah dalam areal kerja PT MHJ.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki data dan informasi tentang kondisi masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya. Data berupa laporan NKT (2014), Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2017, Laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat dan laporan Aksi Cegah Kebakaran tahun 2017.
	4.3.2	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dituangkan dalam prosedur yang telah sah dan legal, diantaranya : SOP Program Social Forestry; SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil).
	4.3.3.	Baik (3)	PT MHJ telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK HTI 2016 dan 2017 serta dokumen RO PMDH 2016 dan RO PMDH 2017. Dokumen RO PMDH telah memuat rencana perusahaan dalam kegiatan kelola sosial secara lengkap dan jelas untuk kegiatan dalam tahun berjalan.

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
	4.3.4	Baik (3)	PT MHJ telah melaksanakan kegiatan kelola sosial sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kegiatan perusahaan. Kegiatan yang telah diimplementasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat sekitar adalah penyuluhan, pelatihan, bantuan peralatan: perikanan, pertanian, peternakan, dan pembangunan sarana fisik untuk kegiatan ekonomi, penyertaan mitra kerja asal desa sekitar.
	4.3.5	Sedang (2)	Distribusi manfaat keberadaan PT MHJ sebagai pemegang IUPHHK HTI kepada berbagai pihak telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan dan bukti setor kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi terkait serta bukti pembayaran kewajiban kepada negara, namun masih ada kewajiban yang belum terpenuhi. Distribusi manfaat untuk masyarakat sekitar diwujudkan dalam bentuk kegiatan CD-CSR dan kerjasama dengan mitra lokal dalam beberapa kegiatan operasi perusahaan.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam SOP Penyelesaian Konflik Lahan; SOP Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan; serta Kompensasi Sumber Daya Komuniti. Prosedur yang ada telah disusun dengan mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah sekitar PT MHJ. Implementasi upaya penyelesaian konflik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa mekanisme yang ada dapat diterapkan pada permasalahan yang ada.
	4.4.2	Sedang (2)	PT MHJ telah membuat peta konflik, yang dituangkan dalam Peta Konflik 2017. Peta menjelaskan keberadaan konflik yang disebabkan oleh klaim dan keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja. PT MHJ juga telah berupaya menyusun pemetaan resolusi konflik PT MHJ tahun 2017 sesuai ketentuan namun belum selesai.
	4.4.3	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan konflik. Kelembagaan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah jika memerlukan mediasi lebih lanjut. Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal kerja PT MHJ menunjukkan bahwa kelembagaan resolusi konflik yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan didukung pendanaan operasional dari perusahaan
	4.4.4	Baik (3)	Dokumen proses penyelesaian konflik yang terjadi terkait permasalahan yang ada pada PT MHJ cukup lengkap dan jelas. Tersedia dokumen penyelesaian konflik yang dilaksanakan dalam periode tahun 2017 berupa SPK dan berita acara tentang peng-klaim lahan garapan dalam area kerja PT MHJ dalam bentuk kerja sama tanaman kehidupan dan pembagian hasil tanaman kehidupan
4.5 BAIK (3)	4.5.1.	Baik (3)	PT MHJ telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk Perjanjian Kerja Bersama (Group) yang secara umum dapat diterapkan pada seluruh karyawan dalam grup perusahaan. Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan bahwa PT MHJ telah merealisasikan hubungan industrial yang

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			termuat dalam dokumen PKB diantaranya kepastian kerja karyawan dengan adanya kontrak kerja dan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh perusahaan, keberadaan prosedur penyelesaian keluhan dan kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial.
		Baik (3)	PT MHJ telah merencanakan pengembangan kompetensi karyawan dengan penyertaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang bersifat teknis berupa pemadaman kebakaran dan K3 serta penyertaan tenaga teknis Kehutanan. Realisasi pelatihan untuk tahun 2017 telah terpenuhi.
		Baik (3)	PT MHJ telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang karir karyawan sebagaimana yang termuat dalam PKB. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir terkait ketenagakerjaan yang ada. Dalam satu tahun terakhir (2016-2017) terdapat kegiatan penilaian karyawan, mutasi karyawan, dan pengangkatan karyawan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap
		Sedang (2)	PT MHJ telah memenuhi kewajiban perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa kesepakatan yang tertuang dalam PKB, meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana kesehatan dan perlengkapan K3. Namun hingga saat ini belum terbentuk koperasi karyawan sesuai isi PKB. Prosedur K3 telah lengkap melingkupi seluruh unsur kegiatan perusahaan baik untuk karyawan maupun karyawan mitra kerja. Penggunaan APD sesuai ketentuan yang ada. Pelayanan kesehatan cukup memadai untuk karyawan PT MHJ dan karyawan mitra kerja dengan adanya klinik bersama di camp perusahaan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Argumen
P.1/ K.1.1/ I.1.1.1	a	Memenuhi	- Dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK Pembaharuan IUPHHK-HT No. 101/Menhut-II/2006 tanggal 1 April 2006 diampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE, MSi. tanggal 11 April 2006. - Hasil overlay Peta Areal Kerja PT MHJ skala 1 : 100.000 dengan Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT MHJ masih masuk ke dalam fungsi kawasan untuk Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.332,99 Ha.
	b	Memenuhi	PT MHJ telah melunasi tagihan Iuran IUPHHK-HT pada tanggal 3 Juli 2003 dengan nilai pembayaran sesuai dengan nilai tagihan SPP IUPHHK.
	c	NA (Not Applicable)	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya pada

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Argumen
			areal kerja PT MHJ.
P.2/ K.2.1/ I.2.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Revisi RKUPPHK-HTI PT MHJ periode 2009 s/d 2018 yang disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan dilampiri peta. Dokumen tersebut disusun berbasis IHMB oleh GANIS PT MHJ. - Tersedia dokumen RKTUPPHK-HT Tahun 2016 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. MHJ dengan nomor Surat Keputusan (SK) 01/MHJ/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan dilampiri Peta Rencana Kerja yang disusun oleh Ganis PHPL-Canhut dengan skala 1 : 50.000. - Tersedia dokumen RKTUPPHK-HT Tahun 2017 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. MHJ dengan nomor Surat Keputusan (SK) 01/MHJ/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan dilampiri Peta Rencana Kerja yang disusun oleh Ganis PHPL-Canhut dengan skala 1 : 50.000
	b	Memenuhi	Tersedia Peta RKTUPPHK-HTI tahun 2016 dan tahun 2017 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung dengan menggunakan warna merah. Peta tersebut dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan. Lokasi kawasan lindung tersebut, di lapangan ditandai dengan tanda batas antara lain berupa Papan kawasan lindung DPSL, Patok Batas DPSL dan KPPN, Sign Plate KPPN, Kawasan Rehabilitasi (jelutung) dan Batas KPPN/DPSL dengan areal produktif/tanaman pokok.
	c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Peta RKTUPPHK tahun 2016 dan tahun 2017 PT MHJ telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama IUPPHK-HT PT. MHJ. Batas blok/petak terbangun pada peta tersebut digambarkan dengan garis batas berwarna hitam dan orange tebal serta telah dicap (stempel). - Overlay hasil verifikasi lapangan dengan peta kerja menunjukkan kesesuaian antara batas-batas blok maupun batas petak dengan peta. - Tanda batas blok dapat dilihat jelas di lapangan berupa patok beton/patok paralon berbentuk bulat dengan warna putih dan penandaan batas berupa papan/plang yang berisi informasi Batas Blok RKT. Tanda batas blok/petak juga berupa kanal baik kanal primer, kanal sekunder maupun parit kolektor
P.2/ K.2.2/ I.2.2.1	a	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPPHK-HTI berbasis IHMB periode 2009 s/d 2018 PT MHJ yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.134/VI-BUHT/2011 tanggal 11 Oktober 2011. Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampiran yang dibuat dengan skala 1 : 100.000
	b	NA (Not Applicable)	Pada Periode bulan November 2016-Oktober 2017, PT MHJ tidak memanfaatkan kayu hutan alam yang berasal dari areal penyiapan lahannya
P.3/ K.3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas yang berwenang untuk membuat dokumen LHP pada periode November – Desember 2016 yaitu atas nama Usman Nomor Register 02320-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku Ganis 09 Agustus 2019 berdasarkan SK.375/PHPL-BPHP III/PEPHP/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa penugasan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Argumen
			<p>sampai dengan tanggal 03 Januari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan untuk periode bulan Januari – Oktober 2017 petugas yang berwenang untuk membuat dokumen LHP adalah an Surya Dharma, No. reg. 02505-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku Ganis s.d 30 Oktober 2019 dan masa penugasan s.d 31 Desember 2017 - Dari hasil uji petik diketahui bahwa terdapat kesesuaian fisik kayu dilapangan dengan di dokumen sehingga identitas kayu dapat ditelusuri hingga blok RKT
P.3/ K.3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	Kayu yang telah diLHP-kan diangkut dari TPn ke TPK Hutan dilengkapi dengan Surat Pengantar. Kemudian pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK antara dilengkapi dokumen SKSHHK, kayu diangkut ke dermaga dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Pengantar. Dari dermaga menuju industri, pengangkutan kayu dilengkapi dokumen SKSHHK Lanjutan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
P.3/ K.3.1/ I.3.1.3	a	NA (Not Applicable)	PT MHJ merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
	b	Memenuhi	PT MHJ memiliki Label tumpukan kayu yang menjelaskan identitas kayu yang dapat ditelusuri serta telah diterapkan secara konsisten
P.3/ K.3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah yang dilampiri dengan DKB - Penerbit SKSHHK PT MHJ Periode November 2016 – Oktober 2017 adalah Adi Candra No. Register 01514-03/PKBR/III/2014 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 11 November 2017, Syahrul No. Register 01291-03/PKB-R/III/2017, dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 dan Asrizal No Register 01935-03/PKB-R/III/2015 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 - Petugas P3KB PT MHJ Periode November 2016 – Oktober 2017 adalah Reza No. Register 0085-03/PKB-R/III/2016 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
P.3/ K.3.2/ I.3.2.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - SPP PSDH PT MHJ Periode November 2016-Okttober 2017 SPP yang diterbitkan sebanyak 61 dokumen. - Terdapat kesesuaian mengenai kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan dokumen SPP PSDH yang diterbitkan
	b	Memenuhi	SPP PSDH PT MHJ pada periode November 2016 – Oktober 2017 telah dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP.
	c	Memenuhi	Tarif yang tercantum dalam SPP PSDH PT MHJ periode Januari – Oktober 2016 telah sesuai dengan tarif yaitu sebesar Rp 5.400,00 atau 6% (sesuai PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014) dari Rp 90.000,00 (sesuai Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014)
P.3/ K.3.3/ I.3.3.1		Memenuhi	PT MHJ telah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor : 1/UPP/PKAPT/01/2014, yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2019.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Argumen
P.3/ K.3.3/ I.3.3.2		Memenuhi	Tersedia 68 (enam puluh delapan) dokumen surat persetujuan berlayar PT MHJ Periode November 2016 – Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Penyalai dari Kantor UPT Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Batu Kundur. Dalam setiap dokumen Persetujuan Berlayar tersebut dilengkapi dengan Manifest yang di dalamnya menerangkan bahwa kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia
P.3/ K.3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT MHJ telah memiliki sertifikat PHPL sejak tahun 2013 yang diterbitkan oleh LP & VI PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor sertifikat IMS-SPHPL-008. - Penggunaan tanda V-legal PT MHJ diterapkan pada Surat pengantar dan dokumen angkutan (SKSHHK) yang kayu dari TPK Antara menuju ke industri dan tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mengiringi Nomor P.14/PHPL/SET/4/20116 tanggal 26 April 2016.
P.4/ K.4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT MHJ telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) dan dilampiri peta yang telah disetujui oleh Bupati Pelalawan melalui surat No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan IUPHHK-HT A.n. PT. MHJ
P.4/ K.4.1/ I.4.1.2	a	Memenuhi	Dokumen RKL-RPL disusun berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Bupati Pelalawan melalui SK No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003, yang penyusunannya telah sesuai prakiraan dampak penting dan besar dalam ANDAL
	b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengelolaan lingkungan pada areal lindung, pada areal efektif untuk produksi dan pada areal tidak efektif untuk produksi. Dalam pengelolaan aspek sosial, ekonomi dan budaya, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengembangan CSR, Pengembangan HHBK dan pembedayaan warga tempatan seperti penyertaan tenaga kerja lokal - Terdapat pemantauan lingkungan pada kawasan lindung (pendataan terhadap tumbuhan, satwa liar, keutuhan kawasan dan fisik gambut), pengelolaan pada areal efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap curah hujan dan hari hujan, sifat fisik dan kimia tanah, subsidensi gambut, water level dan water table, Satwa liar dan Hama/penyakit tanaman pokok) dan pengelolaan pada areal tidak efektif untuk produksi (pengukuran dan pengamatan terhadap perubahan debit outflow, kualitas air permukaan dan kualitas udara)
P.5/ K.5.1/ I.5.1.1	a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SOP-SOP yang terkait dengan K3 yang dimiliki PT MHJ dan terdapat P2K3 yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No KPTS.566/DTKT-Was/2016 tanggal 22 Desember 2016. - Terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan sosialisasi K3 yang telah dilakukan berupa pemasangan kebijakan K3 pada tempat-tempat strategis. - Terdapat peta dan tanda jalur evakuasi termasuk titik kumpul
	b	Memenuhi	Terdapat Daftar Peralatan K3 di PT MHJ yang dibuat oleh Ahli K3 Umum dan Diketahui oleh Kepala Unit HTI hasil tinjauan lapangan diketahui terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Argumen
	c	Memenuhi	<p>yang dilengkapi dengan tenaga medis (Mantri) dan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan obat-obatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT MHJ periode November 2016 – Oktober 2017 yang dibuat setiap bulan dengan mencatat tanggal, Kejadian Kecelakaan Kerja dan Keterangan yang dibuat oleh Erik Afriadi dan diketahui Kepala Unit HTI dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. - Terdapat upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja dengan melakukan Identifikasi Bahaya, Sosialisasi Prosedur Ketentuan K3 kepada kontraktor, Sosialisasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan, Training Alat Pelindung Diri (APD) dan Kegiatan Pengasapan (Fogging). Selain itu terdapat penerapan program K3 seperti melengkapi APD, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK), melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrasi di tempat kerja dan pembuatan plang himbauan K3.
P.5/ K.5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SK Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang- Distrik MHJ Masa Bakti 2015 – 2017 No. 024/SK/KU/SP-MAR/IX/07/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang ditetapkan oleh Ketua Umum SP. Mitra Abadi Riau
P.5/ K.5.2/ I.5.2.2		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mitra Hutani Jaya periode 2016 – 2018 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : KPTS.560/DTKT-PKB/2016/005 tanggal 31 Mei 201
P.5/ K.5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah umur di PT MHJ. Berdasarkan Daftar Karyawan PT MHJ Tahun 2017, karyawan termuda adalah atas nama Debi Ardhiansyah (logistic) , dengan tanggal lahir 11 Juli 1996 (umur 21 tahun 4 bulan). Selain itu terdapat komitmen manajemen PT MHJ yang menyatakan tidak membenarkan/melarang mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun di semua lini